BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. (Mardiasmo, 2008)

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaran pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil

pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan . Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tersebut diatas harus berpedoman dan berdasarakan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Chabib dan Heru, 2010).

Laporan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan dan sekaligus merupakan salah satu tolak ukur kinerja *financial* pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sementara bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk penilaian kinerja.

Kabupaten Bandung merupakan Pemerintah Daerah yang wajib membuat atau mempertanggungjawabkan kegiatannya ekonominya kepada semua entitas baik itu internal maupun eksternal. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tewujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung disusun oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan (DPPK) selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah), yang merupakan laporan keuangan gabungan dari Seluruh SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD(Pejabat Pengelolaa Keuangan Daerah) Kabupaten Bandung.

Laporan Keuangan Pemerintah daerah untuk tahun Anggaran 2011 berdasarkan hasil Audit Badan Pemerinksaan Keuangan (BPK) masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Opini ini di dapatkan pemerintah kabupaten bandung dari tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 laporan keuangan pemerintah daerah baru dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan oleh BPK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Sumpena,SE selaku Kasi Akuntansi Belanja Langsung mengemukakan bahwa, penomena diatas tidak luput dari masih belum maksimalnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung (SKPKD) dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini diseba

bkan karena Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung masih mengalami hambatan dalam penyusunan laporan keuangannya. Hambatan-hambatan yang dialami DDPK diantaranya, masih manualnya sistem pencatatan laporan keuangan sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan sering mengalami salah pencatatan secara tematis (pejumlahan dan penguranganya). Selain itu Sumber Daya manusia yang dimiliki DPPK kabupaten bandung masih sangat kurang, baik dari Kualitas maupun kuantitas sehingga menyebabkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah belum menunjukan peningkatan yang berarti. Dan pada akhirnya hambatan-hambatan ini

mempengaruhi pelaporan keauangan yang dihasilkan oleh pemerintah kabuapten bandung khususunya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk Tugas Akhir dengan judul:

"**Tinjauan Atas Laporan Penyusunan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Masih manulanya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Belum maksimalnya SDM yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupten Bandung baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dians Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan Keuangan pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Kabupaten Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dians Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung ?

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung Jl Raya Soreang Km.17 Telp.(022) 5891580 Soreang 40912.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan April sampai dengan Juni 2013, penyusunan laporan penelitian dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1

Waktu pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Mar	April	Mei	Juni	Juli
I	**Tahap Persiapan**					
	1.Membuat Proposal Tugas Akhir					
	2.Menentukan Tempat Penelitian					
II	**Tahap Pelaksanaan**					
	1.Mengajukan Proposal Penelitian					
	2.Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan					
	3.Penelitian diperusahaan					
	4.Bimbingan tugas akhir					
III	**Tahap Pelaporan**					
	1.Menyiapkan draft tugas akhir					
	2.Sidang tugas akhir					
	3.Revisi tugas akhir					
	4.Penyerahan tugas akhir					